



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI GORONTALO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANAK AGUNG AYU PUTU OKA DEWI IRIANI
2. Jabatan : HAKIM AD-HOC
3. NHK : 446096

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.300.000.000**

1. Tanah Seluas 730 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 840 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 5000 m2 di JEMBRANA, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/242 m2 di BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah Seluas 500 m2 di BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 400.000.000**

1. MOBIL, BMW 318i SEDAN Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI LANCER SEDAN Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, TOYOTA HARDDTOP JEEP Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 100.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 125.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**



Sub Total	Rp.	3.925.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.925.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.